

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Mohammad Muzamil (2014)

Mohammad Muzamil (2014) meneliti tentang analisis penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit pada BRI kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem pengendalian internal, teori tentang bank dan teori kredit. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah unsur-unsur sistem pengendalian internal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan kuisioner, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan.

Persamaan:

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan sistem pengendalian intern sebagai permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

adalah wawancara, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif.

Perbedaan:

Penelitian Mohammad Muzamil (2014) menggunakan perbankan konvensional sedangkan penelitian ini menggunakan perbankan BPR.

2. Fitri Khaula Hatsari, Moch. Dzulkrirom AR dan Muhammad Saifi (2014)

Fitri Khaula Hatsari, Moch. Dzulkriro AR dan Muhammad Saifi (2014) meneliti tentang evaluasi sistem dan prosedur penyaluran kredit konsumtif dalam upaya mendukung pengendalian intern pada koperasi karyawan PRIMKOPPOS Samarinda. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penyaluran kredit kepada anggota koperasi karyawan PRIMKOPPOS Kota Malang, dan mengetahui sistem dan prosedur penyaluran kredit konsumtif kepada anggota koperasi yang dilakukan oleh koperasi karyawan PRIMKOPPOS Kota Malang sudah atau belum mendukung aspek pengendalian intern. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mendalami permasalahan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai permasalahan tersebut. Hasil penelitian adalah beberapa aspek dalam pengendalian intern belum mendukung pengendalian intern seperti tidak ada struktur organisasi secara diagram yang menjelaskan pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, belum ada kroscek

secara mendetail yang dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Karyawan PRIMKOPPOS dalam pengesahan keputusan permohonan kredit konsumtif, dan dalam praktik yang sehat formulir yang digunakan belum bernomor urut acak, serta terjadi penumpukan fungsi.

Persamaan:

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Perbedaan:

Penelitian Fitri Khaula Hatsari, Moch. Dzulkirom AR dan Muhammad Saifi (2014) menggunakan koperasi sedangkan penelitian ini menggunakan perbankan BPR.

3. Luh Artining Miradewi, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Gede Adi Yuniarta (2014)

Luh Artining Miradewi, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Gede Adi Yuniarta (2014) meneliti tentang evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali kantor cabang Seririt. Penelitian bertujuan untuk menguji efektivitas sistem pengendalian intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt. Dalam penelitian ini kuisioner disebarkan secara langsung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt pada bagian pemasaran dengan jumlah kuesioner tujuh responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern dan melakukan pengujian

efektivitas dengan menggunakan *attribut sampling*, model *stop-or-go sampling*. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Hasil pengujian menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan *attribut sampling*, metode *stop-or-go sampling* menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif.

Persamaan :

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan sistem pengendalian intern sebagai permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu metode pengujian menggunakan *attribut sampling*, model *stop-or-go sampling*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. Robin Gita Mandiri, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014)

Robin Gita Mandiri, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) meneliti tentang analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada badan usaha milik desa

(BUMDES) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Tajun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai dan tiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Persamaan :

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan sistem pengendalian intern sebagai permasalahan yang diangkat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel random sampel *simple random sampling*. Sedangkan pada penelitian yang saat ini tidak menggunakan sampel.

5. Nurmala N. (2015)

Nurmala (2015) meneliti tentang analisis pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit griya BNI pada BNI LNC Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit Griya pada BNI LNC Palembang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan study pustaka. Jenis data yang dipakai dalam penelitian data sekunder, dimana teknik analisis data yaitu dengan cara menganalisis pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit griya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit griya pada BNI LNC sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana ketat dan selektifnya prosedur dalam meneliti dan menyeleksi calon nasabah sebelum yang mau akad kredit disetujui oleh pihak bank, namun masih perlu ditingkatkan lagi penerapan standar operasional khususnya bagi petugas dalam melakukan survey lapangan terhadap calon nasabah maupun phsyik rumah yang akan diambil karena belum ada petugas khusus, tapi ditunjuk berdasarkan situasi dan kondisi sumber daya manusia yang ada saja pada saat survey dilakukan.

Persamaan:

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data dengan study pustaka, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu peneliti saat ini sistem pengendalian internnya berfokus pada model COSO.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengendalian Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern sangat berguna bagi manajemen karena merupakan panduan untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus membantu kebijakan manajemen yang ditetapkan agar berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut. Menurut Romney (2013) Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi.

2. Sejarah COSO

Pengendalian intern merupakan unsur kunci pada *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) tahun 1977 dan Sarbanes-Oxley tahun 2002 yang mengharuskan peningkatan pengendalian intern pada perusahaan-perusahaan publik Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat Sox atau SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. Beberapa aturan mengenai Teknologi Informasi Audit disusun di Amerika Serikat yang meliputi beberapa aturan penting seperti Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act merupakan produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengolahan data di perusahaan publik. Secara umum Sarbanes-Oxley terdiri dari tiga bagian penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan publik yaitu seksi 404, 906 dan 302. Pada seksi 404 inilah berisi tentang peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangan. Dalam mengevaluasi internal kontrol yang dilaksanakan perusahaan, manajemen melalui departemen internal kontrol atau audit perlu menggunakan kerangka yang disusun oleh COSO.

Sehubungan dengan maraknya kecurangan (*fraud*) keuangan dan praktik penyuapan perusahaan Amerika Serikat kepada pejabat/pegawai asing pada tahun 1970-an, SEC dan Kongres Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang dikenal dengan nama *Foreign Corrupt Practices Act*

(FCPA) pada tahun 1977. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk memastikan (1) perilaku bisnis yang wajar, (2) akuntabilitas dan integritas di pemerintahan, (3) distribusi sumber daya ekonomi berbasis efisiensi dan kesetaraan. Perusahaan/warga negara Amerika Serikat yang melakukan penyuapan kepada pejabat/pegawai asing dapat dikenakan sanksi berdasarkan FCPA tersebut.

Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an tersebut dirasakan belum berpengaruh signifikan karena praktek kecurangan masih saja terjadi. Sebagai respon hal tersebut, pada tahun 1985 bentuk komisi nasional yang disebut *National Commission on Fraudulent Financial Reporting* oleh lima asosiasi profesi yang berpusat di Amerika Serikat (yaitu AICPA, AAA, FEI, IMA dan IIA). Komisi tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan nama *The Treadway Commission*. *Treadway* sebenarnya adalah nama ketua pertama dari komisi tersebut, lengkapnya James C. Treadway. Tujuan pembentukan komisi adalah untuk melakukan penelitian mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan dan merumuskan rekomendasinya. Komisi tersebut mempelajari pelaporan informasi keuangan dari tahun 1985 dan menghasilkan laporan pertama pada bulan Oktober 1987 dengan judul *Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting*. Dalam laporan tersebut terdapat rekomendasi berupa perlunya pengembangan pedoman pengendalian intern yang terintegrasi. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi itu, dibentuklah *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

COSO selanjutnya mengandeng kantor akuntan besar Coopers dan Lybrand untuk melakukan studi dan menerbitkan kerangka kerja pengendalian intern. Pada tahun 1992 COSO mempublikasi sebuah kerangka kerja pengendalian intern yang akhirnya banyak menjadi acuan bagi para dewan direksi, eksekutif, regulator, prnyusun standar, organisasi profesi untuk mengukur efektivitas pengendalian intern. Kerangka kerja itu dikenal dengan sebutan *Internal Control-Integrated Framework*. Pada tahun 1994 kerangka kerja tersebut mengalami perubahan minor dengan tambahan ruang lingkup terkait *management report of internal control*. Kerangka kerja pengendalian intern COSO 1992 memberikan definisi umum tentang pengendalian intern dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian intern. Kerangka tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern dirancang untuk memeberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi yaitu: (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kompone COSO terdiri dari lima unsur yaitu: (1) *control environment*, (2) *risk assessment*, (3) *control activities*, (4) *informatian and communication*, (5) *monitoring*.

Di sisi lain, proyek penelitian COSO terkait pengendalian intern masih terus berjalan. Pada tahun 2006 COSO menerbitkan *Internal Control over Financial Reporting-Guidance for Smaller Public Companies*. Pedoman ini dilekuarkan sebagai acuan terutama bagi perusahaan publik yang berukuran kecil untuk memenuhi ketentuan Sarbanes Oxley Act Section

404 yang mengatur perusahaan publik untuk menilai dan melaporkan efektivitas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan setiap tahun. Rupanya ketentuan tersebut mengakibatkan timbulnya biaya yang memberatkan bagi perusahaan kecil. Oleh karena itu COSO membuat pedoman agar masalah tersebut dapat diatasi. Pedoman terdiri dari empat paket yaitu (1) *Executive Summary*; (2) *Guidance*; (3) *Evaluation Tools*; (4) *Working Tools*. (www.klikharso.com)

3. Pengendalian intern menurut COSO (2013)

Menurut COSO (2013) pengendalian intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini : Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Wahyunidewi : 2014)

4. Unsur-unsur atau komponen Pengendalian Intern menurut COSO

(Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart: Edisi 9 halaman 222-252)

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Invironment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Procedure*)

Menurut COSO, penilaian risiko adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

d. Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu.

e. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan (terus menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu.

5. Tujuan dari Pengendalian Intern menurut COSO

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas Dewan Komisaris, jajaran Manajemen dan seluruh pegawai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar terhadap pencapaian tujuan perusahaan:

- a. Keandalan pelaporan keuangan,
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi,
- c. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

6. Unsur-unsur Pengendalian Intern.

Unsur-unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2010) adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
- d. Karyawan mutunya sesuai tanggung jawab.

Keempat unsur pengendalian intern merupakan unsur yang paling penting dan sangat mendukung, dengan terciptanya keselarasan maka akan tercipta keefektifan dalam mencapai tujuan perusahaan.

7. Teori Sistem Pengendalian Intern yang baik dan efektif adalah sebagai berikut:

a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaan harus memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.

b. Tugas pertanggungjawaban

Semua tugas atau kewajiban telah didefinisikan secara jelas dan ditugaskan kepada masing-masing individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan.

c. Memberikan kekuasaan yang tepat

Suatu organisasi biasanya mempunyai suatu aturan-aturan tertulis yang memuat bagaimana prosedur-prosedur pengesahan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan akan membutuhkan kuasa yang layak.

d. Pemisahan tugas

Konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal akan membatasi terjadinya suatu kesalahan. (www.materiakuntansi.com)

2.2.2 Sistem Pengendalian Intern

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut (Mulyadi : 2010) adalah suatu sistem yang meliputi struktur ekonomi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.2.3 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Sistem pengendalian intern pemberian kredit menurut Mulyadi (2013) adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian intern kredit penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian intern kredit yang baik dan benar.

2.2.4 Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentudengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998).

Menurut Ikatan Bangkir Indonesia (IBI) (2013) berpendapat bahwa kredit bank memiliki pengertian sebagai penyedia dana atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah dengan menyertakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Kepercayaan merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, bukan hanya ditujukan kepada si peminjam, tetapi keadaan harta benda peminjam, keadaan usaha serta kesanggupan pembayaran kredit beserta bunganya.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasminar (2012), prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.
3. Wawancara awal.
4. *On the spot* (surve lapangan).
5. Wawancara akhir.
6. Keputusan kredit.
7. Penandatanganan akad kredit.

8. Realisasi kredit.

9. Penyaluran kredit.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam menjalankan usahanya Bank harus mempunyai fungsi dan tujuan tertentu demi memperlancar usahanya dan pemberian kredit kepada masyarakat harus berdasarkan tujuannya. Adapun tujuan kredit menurut Kasmir (2012) adalah

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan adanya dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2012) bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

4. Unsur-unsur Kredit

Diatas dikatakan bahwa dalam sebuah pemberian kredit harus didasarkan dengan kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar akan dikembalikan tepat pada waktunya disertai bunga yang telah disepakati. Berdasarkan hal ini unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit atas prestasi (uang, barang atau jasa) yang diberikan kepada pihak debitur akan dilunasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko (*Degree Of Risk*)

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit akan menimbulkan risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu tersebut. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya demikian juga sebaliknya, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan mencegah wanprestasi dari debitur, maka diperlukan pengikatan jaminan atau agunan.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit yang dikenal dengan nama bunga.

5. Macam-macam Kredit

Menurut Kasmir (2012) macam-macam kredit dibedakan menjadi lima yaitu :

a. Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi : biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Kredit Modal Kerja : digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Segi tujuan kredit

1. Kredit Produktif : kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Kredit Konsumtif : kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit Perdagangan : kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek : merupakan kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun biasanya untuk modal kerja.
2. Kredit jangka menengah : merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

d. Segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan : kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
2. Kredit tanpa jaminan : merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Namun melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e. Segi sektor usaha

1. kredit premium : merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
2. Kredit peternakan : merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan.
3. Kredit industry : merupakan kredit untuk membiayai industry kecil menengah atau besar.

6. Kredit Bermasalah (Kredit Mancet)

Salah satu penyebab dari keadaan kredit bermasalah adalah karena adanya kesulitan dalam keuangan yang dialami oleh debitur yang timbul dari berbagai risiko-risiko. Menurut Sinungan (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Managerial factor

Managerial faktor seringkali disebut sebagai faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama kesulitan negara

- a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan.
- b. Tidak efektifnya pengawasan atas biaya-biaya atau ongkos-ongkos perusahaan.
- c. Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif.
- d. Terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap.
- e. Permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor-faktor ekstern

- a. Bencana alam.
- b. Peperangan.
- c. Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.
- d. Perubahan-perubahan teknologi.

7. Kolektibilitas Kredit

Adapun penerapan kolektibilitas kredit menurut Triandaru dan Budiarmo (2006:118-120) dihilat dari pedoman sebagai berikut:

- a. Lancar

Menurut kriteria prospek usaha:

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

2. Pasar stabil dan tidak terpengaruh perekonomian, persaingan terbatas dan kapasitas optimum.
3. Manajemen sangat baik dan tenaga kerja memadai serta belum pernah ada perselisihan/pemogokan atau pernah ada ringan dan selesai baik.
4. Alifiasi/ grup stabil dan mendukung.
5. Pengolahan lingkungan hidup baik dan dampaknya minimum pertahun.

Menurut kriteria kinerja (performance) debitur:

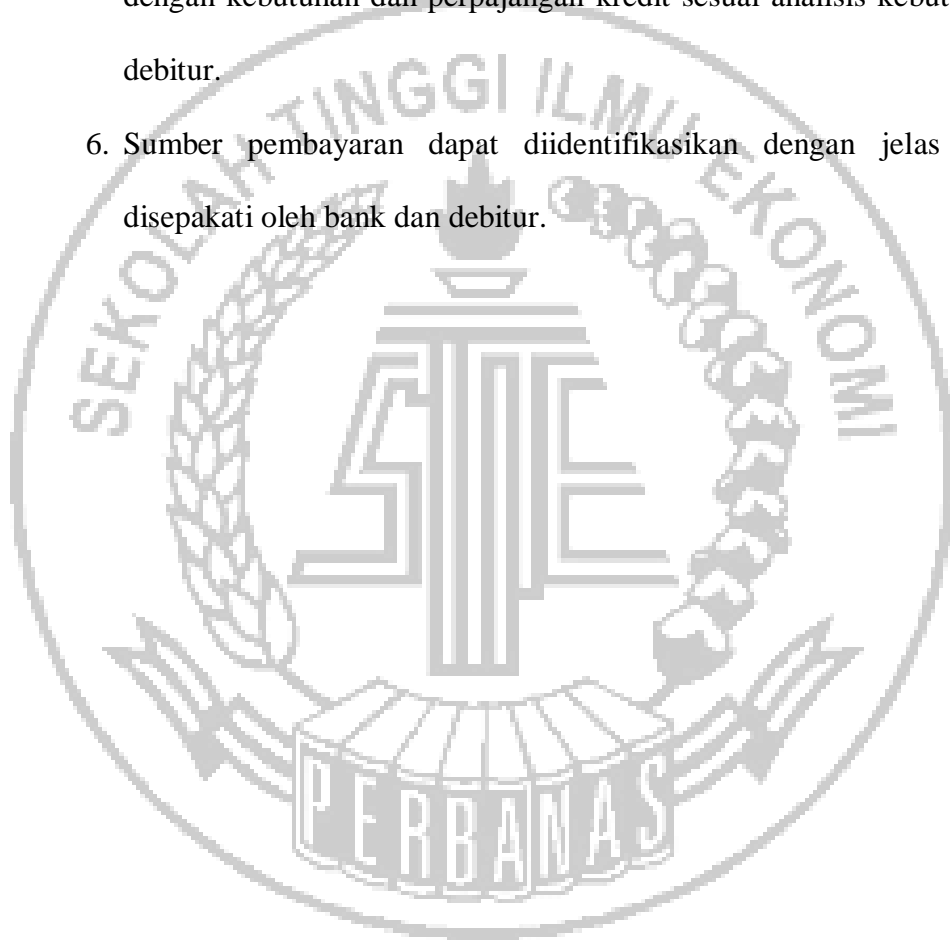
1. Laba tinggi dan stabil.
2. Permodalan kuat.
3. Likuiditas dan modal kerja kuat.
4. Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur mampu membayar pokok dan bunga tanpa sumber dana tambahan.
5. Portofolio sensitive kurs valas dan bunga relative sedikit atau di hedging dengan baik.

Menurut kriteria kemampuan membayar:

1. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak baik ada tunggakan serta sesuai dengan syarat kredit.
2. Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu memberikan informasi keuangan teratur dan akurat serta ada laporan keuangan

terkini dan hasil analisis bank atas laporan informasi keuangan dari debitur.

3. Dokumentasi kredit lengkap.
4. Tidak ada pelanggaran perjanjian kredit.
5. Penggunaan dan sesuai permohonan, jumlah dan jenis fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan perpajakan kredit sesuai analisis kebutuhan debitur.
6. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur.



2.3 Kerangka Pemikiran

Kredit Bermasalah pada PT. BPR Anugerah Paktomas Ngunut-Tulungagung

